

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Isu mengenai *good corporate governance* mulai populer khususnya di Indonesia, pada saat sejumlah negara-negara di Asia Timur dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan pada tahun 1997. Terdapat banyak akibat buruk dari krisis tersebut, salah satunya ialah banyaknya perusahaan yang berjatuh karena tidak mampu bertahan. Banyak kalangan menyebutkan bahwa lemahnya *good corporate governance* yang menjadi pemicu terjadinya krisis ekonomi di negara-negara Asia khususnya di Indonesia. Selain itu, lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan para manajemen juga menjadi penyebab runtuhnya perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, *good corporate governance* menjadi perhatian pemerintah untuk membenahi dan pengembangan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam rangka pemulihan perekonomian di Indonesia (Lestariningsih, 2008).

Pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* ini di lingkungan BUMN, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha

Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Komitmen GCG juga diberlakukan pada sektor swasta non-BUMN. Pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang sekarang sudah menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 perihal peraturan pencatatan efek nomor I-A yang antara lain mengatur tentang kewajiban mempunyai komisaris independen, komite audit, memberikan peran aktif sekretaris perusahaan di dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi serta mewajibkan perusahaan tercatat untuk menyampaikan informasi yang material dan relevan.

Dengan komitmen penerapan *good corporate governance* yang diberlakukan di PT Bursa Efek Indonesia sebagai pelaksana pasar modal di Indonesia, maka diharapkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia bisa mendapatkan kepercayaan dari para pelaku bisnis, dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan.

Penelitian ini termotivasi oleh keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi ekonomi dengan meningkatkan kualitas *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, yang pada gilirannya hal ini dapat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Munisi and Randoy, 2013).

Beberapa penelitian tentang variasi *corporate governance* pada tingkat perusahaan lebih banyak dilakukan di Amerika dan negara-negara anggota OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) (Darmawati, Khomsiyah dan Rahayu, 2004). Selain itu, penelitian-penelitian tentang *good corporate governance* juga banyak dilakukan di negara-negara berkembang, seperti penelitian dari Darmawati, Khomsiyah dan Rahayu (2004), Kappler and Love (2003), Munisi and Randoy (2013).

Dalam penelitian ini konsep indikator yang dipakai dalam mekanisme *good corporate governance* terdiri dari: ukuran komisaris independen dan komite audit. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 perihal peraturan pencatatan efek Nomor I-A yang antara lain mengatur tentang kewajiban mempunyai Komisaris Independen, Komite Audit.

Komisaris independen sangat berperan dalam mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Adanya komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Widyati (2013) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Komite audit sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good corporate governance* mempunyai tugas pokok membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Apabila pengawasannya baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian terdahulu menemukan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Manik, 2011).

Selain ukuran komisaris independen, dan komite audit, peneliti menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol yang mengontrol komisaris independen dan komite audit. ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan (Salaf, 2010).

Sementara untuk mengukur kinerja keuangan, ada banyak pilihan diantaranya adalah di lihat dari *return on asset*, *return on equitas*, *debt to asset ratio*, dan sebagainya. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan hasil pengembalian investasi (ROI) untuk mengukur kinerja keuangan. Hasil pengembalian investasi (ROI) dapat menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Dengan mengetahui besarnya hasil pengembalian investasi (ROI) suatu perusahaan, maka para investor juga akan mengetahui seberapa besar

tingkat pengembalian dividen yang akan diterima sehingga saham perusahaan tersebut diminati oleh para investor.

Beberapa penelitian telah memberikan bukti bahwa *good corporate governance* dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Seperti penelitian dari *Kappler and Love* (2003) yang menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik sangat berkorelasi dengan kinerja operasional perusahaan. Selain itu juga penelitian dari *Munisi and Randoy* (2013) yang menemukan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja akuntansi perusahaan (ROA).

Berdasarkan uraian diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah: "PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2013".

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan identifikasi masalah yaitu diberlakukan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 perihal peraturan pencatatan efek Nomor I-A yang antara lain mengatur tentang kewajiban mempunyai Komisaris Independen, Komite Audit, memberikan peran aktif Sekretaris Perusahaan di dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi serta

mewajibkan perusahaan tercatat untuk menyampaikan informasi yang material dan relevan.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan?
- 2) Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan?
- 3) Apakah komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan variable control ukuran perusahaan?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan?
- 2) Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan?

- 3) Untuk menguji apakah komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan variable kontrol ukuran perusahaan.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### 1.5.1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman tentang tata kelola perusahaan/*good corporate governance* (GCG) dalam satu perusahaan.

### 1.5.2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan yaitu pada perusahaan *go public* di bursa efek Indonesia untuk mengetahui pentingnya memahami tata kelola perusahaan.